

PEMBENTUKAN KABUPATEN TEBO 1999-2014

Firda Ananda Pratiwi,*Ujang Hariadi**
Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari

Abstrak

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Maka, sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Belanda yang menganggapnya sebagai suatu pemberontakan. Bangsa Indonesia yang telah merasakan penderitaan dan penyiksaan oleh para penjajah tidak ingin terulang kembali. Semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan diberbagai daerah termasuk oleh rakyat Jambi yang juga tampil kedepan untuk turut andi mengambil bagian dengan aktif melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh penjajah. Salah satu sosok pejuang yang berpengaruh di daerah Jambi adalah Syamsu Bahrin, pejuang yang berasal dari daerah Sarolangun. Dilahirkan tahun 1905 di Desa Pangidaran, Kecamatan pauh, Kabupaten Sarolangun. Syamsu Bahrin merupakan sosok yang mampu memberi semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Syamsu Bahrin merupakan pejuang yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa diatas kepentingan pribadinya. Tujuan Syamsu Bahrin, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Syamsu Bahrin merupakan seorang yang tegas, ia adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat cinta terhadap Daerah Jambi.

Kata Kunci : *perann, Syamsul Bahrin.*

Abstract

The proclamation of Indonesian independence on August 17, 1945 by Sukarno-Hatta on behalf of the Indonesian people. So, since then Indonesia has become an independent and sovereign country. However, Indonesia's independence was not recognized by the Dutch who considered it a rebellion. The Indonesian people who have felt the suffering and torture by the colonizers do not want it to happen again. The spirit of the struggle to maintain independence was carried out in various regions, including by the people of Jambi who also came forward to participate and take part in actively fighting against the efforts made by the invaders. One of the influential figures in the Jambi area was Syamsu Bahrin, a fighter from the Sarolangun area. Born in 1905 in Pangidaran Village, Pauh District, Sarolangun Regency. Syamsu Bahrin is a figure who is able to give encouragement in defending independence. Syamsu Bahrin is a fighter who is steadfast in principles and beliefs, always putting the interests of the community and nation above his personal interests. Syamsu Bahrin's goal is to realize Indonesia as a sovereign and independent nation. Syamsu Bahrin is a firm person, he is a figure of a freedom fighter who really loves the Jambi Region.

Keywords: *role, Syamsul Bahrin.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan semangat perubahan dan era otonomi daerah yang terjadi ditanah air, meminta pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan struktursruktur pemerintahan dan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Hal ini secara umum disambut baik oleh masyarakat sekitar sesuai

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Arsip Tebo. 2004:5). Mengacu pada undang-undang tersebut, tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo melaksanakan pemekaran menjadi 2 wilayah, ialah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo yang bertujuan

untuk mempermudah administrasi, dan mengembangkan potensi daerah melalui sektor peningkatan ekonomi, pariwisata, dan memberikan efisiensi pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran ini diharapkan agar bisa mempercepat pembentahan di setiap daerah.

Dalam rangka rencana pemekaran Kabupaten Tebo, masyarakat sangat mendukung terwujudnya pemekaran wilayah. Di Kecamatan Tebo Tengah dukungan warga dalam memperjuangkan Kabupaten Tebo ini didasari atas keputusan bersama antara tokoh warga, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda Muara Tebo begitu pula dikecamatan yang lain seperti Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Pembantu Sumay, serta Kecamatan Pembantu VII Koto juga ikut serta mendukung rencana pemekaran Kabupaten Tebo.

Mengingat rencana Pemerintah Kabupaten Bungo Tebo serta adanya dukungan dari masyarakat sekitar, akhirnya dikeluarkanlah Keputusan DPRD Wilayah Bungo Tebo pada tanggal 21 Mei 1999 No.05 tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Tingkat II Bungo Tebo. Pada saat yang bersamaan juga mengeluarkan Surat Dukungan Pemekaran No. 170/271/1999 tanggal 21 Mei 1999 yang disahkan oleh Syaril Basir selaku Ketua dan H. Asan Jani, S.Ag dan Drs. H. Ade Sayuti sebagai Wakil Ketua.

Keinginan masyarakat tebo untuk memiliki pemerintahan sendiri akhirnya terealisasikan pada tanggal 4 Oktober 1999, yang disahkan oleh

Preseiden RI ke- 3 yakni BJ. Habibie mengenai Pemekaran Kabupaten Tebo. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Tebo resmi menjadi Daerah Otonomi tingkat II yang di pimpin oleh Bupati. Pada awal terbentuknya Kabupaten Tebo terdiri dari 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan Pembantu dengan 5 Kelurahan dan 82 Desa (Arsip Tebo. 2004:5).

Terjadinya pemekaran Kabupaten Tebo dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan ,pemerataan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat diwilayah Kabupaten Tebo. Efisiensi dan efektivitas yang telah tercapai setelah pemekaran berhasil meningkatkan perekonomian dari sektor pertanian, masyarakat mampu mengembangkan potensi wilayah yang dapat digunakan menjadi pusat agribisnis karena mempunyai kawasan yang sangat luas sehingga mampu menghasilkan produksi sebagai berikut yaitu tanaman pangan dan hortikultural, kacang kedelai, jagung, dan produksi beras. Dari sektor perkebunan, komoditas utama adalah tanaman karet dan kelapa sawit yang memiliki harga jual yang tinggi. Ada pula dari sektor perikanan, masyarakat banyak mengembangkan budidaya ikan di sekitar Danau Sigombak yang bertujuan untuk melestarikan alam. Serta ada juga dari sektor peternakan, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan perhotelan. Dari beberapa sektor tersebut sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian daerah (Arsip Tebo. 2004:11).

Adapun tujuan dari pemekaran dan pembangunan

Kabupaten Tebo antara lain sebagai berikut:

1. Meletakkan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan sendiri dengan menjalin kesatuan arah dan tujuan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
2. Mengembangkan struktur perekonomian yang dinamis lewat usaha kecil menengah, dan koperasi. Serta menata perangkat ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian lebih kepada peningkatan SDM.
3. Meningkatkan jumlah serta kualitas pelayanan yang mencakup sarana dan prasarana kesehatan, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan.
4. Memberdayakan kelompok masyarakat serta memberikan pelatihan agar mampu bersaing secara sehat dengan mengandalkan potensi diri maupun kelompok yang didukung oleh pemerintah.
5. Meningkatkan toleransi dan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Kabupaten Tebo sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis tanpa memandang status sosial maupun agama.
6. Meningkatkan keterpaduan dan sinergis antar sektor pariwisata, sektor budaya, sektor sosial yang dapat menjadikan Kabupaten Tebo dapat dikenal oleh masyarakat luas (Arsip Tebo. 2003: 34-37).

Penelitian ini akan mengkaji perkembangan Kabupaten Tebo dalam pembangunan fisik maupun sosial ekonomi. Lebih lanjut penelitian ini ingin melihat perkembangan Kabupaten Tebo tersebut dari segi sosial dan ekonomi pasca terjadinya pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul “Pembentukan Kabupaten Tebo 1999-2014”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni “Bagaimana proses Pemekaran Kabupaten Bungo Tebo dan apa alasan yang melatar belakangi terbentuknya Kabupaten Tebo, dan Bagaimana proses perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tebo?”.

Ruang lingkup penelitian ini lebih dikhawasukan dikawasan Kabupaten Tebo meskipun awalnya masuk kedalam bagian daerah Kabupaten Bungo Tebo, karena adanya kepentingan dari kedua belah pihak wilayah untuk memajukan daerah masing-masing maka terjadilah pemekaran kawasan Kabupaten Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Sedangkan ruang lingkup temporal penelitian ini adalah meliputi tahun 1999, karena pada masa itu awal mula pemekaran Kabupaten Tebo, sedangkan batasan masalah akhir pada tahun 2014 karena pada tahun ini adanya perkembangan penduduk yang pesat serta perkembangan dari sektor ekonomi pada Kabupaten Tebo.

B. METODE

Metode penelitian mengacu pada metode sejarah yang

merupakan suatu prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode ini juga menyangkut prinsip-prinsip yang sistematis serta aturan-aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang efektif. Menilainya secara kritis dan menyajikan secara sistematis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Pelaksanaan tahapan dalam metode sejarah ialah: (1) Heuritis, yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) Kritik (sejarah) yaitu menyelidiki sejarah itu sejati, baik bentuk maupun isinya, (3) Interpretasi , menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh oleh sejarah. (4) Historiografi, menyajikannya secara sistematis berupa cerita sejarah (Kuntiwidjoyo. 2001:63).

Jika dilihat dari tema objek penelitiannya, maka peneliti telah menerapkan bahwa sumber yang digunakan sumber tertulis dan sumber tidak tertulis yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Mulai dari wawancara langsung kepada pelaku yang ikut serta dalam proses pembentukan Kabupaten Tebo, arsip berupa dokumen resmi tercetak, arsip lokal dan melalui kajian literatur seperti jurnal, prosiding, tesis, buku dan artikel dalam bentuk laporan semua sumber literatur ini didapatkan dengan melakukan studi keperpustakaan dan pemanfaatan media internet (*google scholar*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Proses Pembentukan Kabupaten Tebo

Pada era reformasi pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah

daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan kesinambungan pembangunan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di Provinsi Jambi, terdapat 4 daerah yang memiliki kesempatan untuk memekarkan daerahnya yakni Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tebo awal nya gabungan dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bungo Tebo kemudian Kabupaten Bungo Tebo melakukan Pemekaran menjadi 2 daerah yakni Kabupaten Bungo dengan Ibukota Muaro Bungo dan Kabupaten Tebo dengan Ibukota Muaro Tebo.

Jauh sebelum rencana pemekaraan Kabupaten ini dikumandangkan, masyarakat Tebo sangat ingin memiliki daerah otonom sendiri. Keinginan ini sudah terjadi dari tahun 1989 sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/936 tahun 1989 Tentang Pembentukan Wilayah-Wilayah Kerja Pembantu Bupati (PEMDA Bungo Tebo. 1999:5). Lalu di dukung juga oleh pemerintah pusat dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 135/2465/ Tahun 1999 yang ditindak lanjuti oleh Bupati Bungo Tebo Drs. H Sofian Ali dengan mengambil suatu kebijaksanaan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 669 Tahun 1999 Tentang Tim Pelaksanaan Penerapan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kabupaten Bungo Tebo (Zuhdi. : 102).

2. Tahapan Pembantukan

Sebelum menjadi Kabupaten, Tebo terlebih dahulu menjadi pembantu Bupati Wilayah Timur kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengenai penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal dari tahapan pembentukan kabupaten Tebo tentunya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Di Kecamatan Tebo Tengah, mereka mengeluarkan aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Bungo Tebo didasarkan atas keputusan bersama antara tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda lingkungan Muara Tebo. Musyawarah ini di mulai di Aula Kantor Camat Tebo Tengah pada hari Senin tanggal 10 Mei 1999 jam 20.00 WIB. Dalam berita acara musyawarah masyarakat Tebo berisi tentang masyarakat telah sepakat bahwa setelah pemekaran terjadi maka Ibukota akan dipusatkan di Muaro Tebo dan nama kabupaten pemekaran tersebut nantinya diberi nama Kabupaten Tebo dengan Ibu Kota Muara Tebo. Keputusan untuk menetapkan lokasi Ibu Kota Muara Tebo di dasari pada latar belakang sejarah dari Kabupaten Tebo itu sendiri. Muaro Tebo adalah Kota lama yang penuh dengan sejarah. Muara Tebo Sudah dikenal sejak zaman dulu (Wawancara. Ridham Priskap. 4 Februari 2022). Musyawarah tersebut dihadiri oleh:

- a. Dari unsur Pemerintahan yaitu Camat Tebo Tengah Drs. Hamdani Wahid, Sekcam Tebo Tengah Drs. Teguh Arhadi dan Kasi Pemerintahan Muslim, Lurah Tebing Tinggi M. Syargawi Ib
- b. Dari unsur Tokoh Masyarakat yaitu Basir Elman, Ari Razi, Usman Buluran, H. Somad Soib, dan Masdiono
- c. Dari unsur Tokoh Agama yaitu H. Muhammad Mansur, Abdullah Muhidin, dan M. Amin
- d. Dari Unsur Tokoh adat yaitu Rd. Syargawi Ali, Abd. Hamid, dan Syamsul Rizal
- e. Dari Unsur Tokoh Pemuda yaitu Heri Utama, Yanuar, dan Ahmad Yani (Zuhdi. : 103).

Kemudian pada tanggal 10 Mei 1999 Masyarakat Tebo Tengah pun mengeluarkan Aspirasi dengan mengeluarkan Pernyataan Aspirasi Masyarakat Tentang Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo yaitu:

- 1. Mendesak agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi, DPRD Tingkat I Jambi, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo agar segera memproses usulan pemekaran Daerah Tingkat II Bungo Tebo kepada pemerintah pusat di Jakarta untuk dapat ditetapkan dalam bentuk undang-undang.
- 2. Mendesak agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo untuk memberikan porsi anggaran yang memadai guna membiayai pemekaran wilayah secara swadana sehingga tidak tergantung subsidi/ modal pangkal dari pemerintah pusat.

3. Mendesak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo untuk mempersiapkan infrastruktur fisik sebagai fasilitas untuk kegiatan pemerintahan, pelayanan umum dan penataan lingkungan.
4. Mendesak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo untuk menyediakan tanah/laahan bagi infrastruktur fisik dan lingkungan perkantoran sehingga pelaksanaan pembangunan perkantoran pemerintah, fasilitas umum/sosial dan sarana transportasi serta sarana komunikasi dapat dilaksanakan secara baik dan lancar.
5. Mendesak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo untuk menyediakan SDM aparatur pemerintah sesuai kebutuhan baik kualitas maupun kwantitas, sehingga dapat tercipta kondisi DM aparatur pemerintah yang benar-benar dapat mendukung terwujudnya Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo-Tebo.
6. Meminta Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo dalam waktu secepat-cepatnya sebelum Pemilu tahun 1999 (Zuhdi. : 104).

Tabel 1. Daftar nama-nama masyarakat kecamatan Tebo Tengah yang menyatakan aspirasi pemekaran Bungo-Tebo

No	Unsur	Nama	Jabatan
1	Tokoh Masyarakat	1.Azri Razi 2.Usman Buluran 3.H. Somad Suib	
2	Tokoh Agama	1.KH.Muhammad Mansur Hamzah 2.Abdullah Muhibin 3.M.Amin	
3	Tokoh Adat	1.Rd. Syargawi Ali 2.M.Syargawi,Ib 3.Abd.Hamid 4.Syamsul Rizal	
4	Tokoh Pemuda	1.Heri Utama 2.Yanuar 3.Ahmad Yani	
5	Akademisi	1.A.Bujang SPd 2.M.Fahri Arif, SPd 3.Dasyul, BA	
6	Mahasiswa	1.Jufrito 2.Maskur 3.Muhsin	
7	Pelajar	1.Zakiyani Dewi 2.Andri Ariyadi 3.Septiliya 4.Munawar	

Sumber: Pernyataan aspirasi masyarakat kecamatan tebo tengah,tentang pemekaran daerah tingkat II Bungo-Tebo 10 Mei 1999

Esok harinya tanggal 11 Mei 1999, Masyarakat Kecamatan Tebo Ilir di Sungai Bengkal, Masyarakat Pembantu Kecamatan Sumay di Teluk Singkawang, Masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang di Wirotho Agung, Masyarakat Kecamatan Pembantu VII Koto di Sungai abang dan Kecamatan Tebo Ulu di Pulau Temiang juga mengeluarkan pendapat yang serupa yakni meminta Pemekaran Kabupaten Bungo Tebo.

Tabel 2. Daftar nama-nama masyarakat kecamatan Tebo Ilir yang menyatakan aspirasi pemekaran Bungo-Tebo

No	Unsur	Nama	Jabatan
1	Tokoh Masyarakat	1.Ahsyat Sam 2.Maaki Talib 3.M.H Putih	Mantan Pasirah Mantan Lurah Mantan Kades
2	Tokoh Agama	1.Abu Bakar 2.Daud A.Roni 3.Makruba	Imam Masjid Khatib Bilal
3	Tokoh Adat	1.Mahmud Zuhdi 2.Ahmad, He 3.Edwar Ramli	Ketua Lembaga Adat Wakil Ketua Sekretaris
4	Tokoh Pemuda	1.Marzuki, Mr 2.Azhar 3.Janatul Usman	AMPI Ketua K. Taruna Ds Lamo Ketua K. Taruna S. Bengkal
5	Akademisi	1.Syamsul Bahri, S.Pd 2.Drs. Afrizal 3.M.Ganda, S.Pd	Dosen Guru SMA Guru SMP
6	Mahasiswa	1.Iskandar 2.Muslan, S.Ag 3.M. Nur	STKIP IAIN STKIP
7	Pelajar	1.Faturrahman 2.Tamrin 3.Amin	Siswa MAS Siswa SMA Siswa SMP

Kemudian Kecamatan Pembantu Sumay ikut mengeluarkan aspirasi untuk mendorong pemekaran Kabupaten Tebo supaya cepat terealisasikan. Ada 5 unsur masyarakat yang berperan penting yakni Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dalam

menyampaikan aspirasinya masing-masing.

Setelah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintahan Kabupaten Bungo Tebo serta aspirasi masyarakat yang sangat menginginkan pemekaran ini terjadi, serta dampak dari reformasi yang bergulir akhirnya wakil rakyat mendukung rencana pemekaran dengan mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo tanggal 21 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Tingkat II Bungo Tebo dan pada hari yang sama DPRD Bungo Tebo juga mengeluarkan Surat Dukungan Pemekaran Nomor 170/271/1999.

Surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Syaril Basir sebagai Ketua dan H. Asan Jani, S.Ag dan Drs. H. AD Sayuti sebagai Wakil Ketua. Rencana pemekaran ini juga diperkuat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Terbitnya Surat Gubernur Jambi tersebut ditindak lanjuti oleh Bupati Bungo Tebo Drs. H. Sofian Ali dengan mengambil kebijaksanaan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Bungo Tebo Nomor 669 Tahun 1999 Tentang Tim Pelaksanaan Penerapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kabupaten Bungo Tebo.

Menurut M. Hatta S.Sos, pada saat pemekaran Kabupaten Bungo Tebo beliau menjabat sebagai Camat Jujuhan dimana kecamatan

Jujuhan ini akan menjadi bagian dari Kabupaten Bungo. Drs. H. Sofian Ali sebagai Bupati Bungo Tebo sebenarnya menginginkan pemekaran Kabupaten Bungo Tebo bukan hanya menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tetapi juga menginginkan berdirinya Kota Madya Bungo. Akan tetapi hal itu tidak terwujud sehingga hanya Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo saja yang dimekarkan.

Pengesahan Kabupaten Tebo terealisasikan pada tanggal 4 Oktober 1999 dengan ditanda tanganinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Presiden Republik Indonesia Ke-3 BJ. Habibie.

Penunjukan Madjid Mu'az sebagai Bupati Tebo terkesan tiba-tiba, seperti yang disampaikan oleh Madjid Mu'az bahwa beliau diberitahukan agar datang ke rumah Pak Gubernur. Sesampainya beliau disana, langsung ditunjuk sebagai Bupati Kabupaten Tebo. Kemudian beliau diberitahukan untuk mempersiapkan kemeja putih untuk dipakai menghadiri pelantikannya. Pak Madjid Mu'az mengatakan bahwa "lebih enak menjadi caretaker bupati dari Kabupaten karena hanya menyediakan kemeja putih saja tanpa mengeluarkan biaya untuk hal lainnya"

Pada tanggal 12 Oktober 1999, Drs. H. A. Madjid Mu'az. MM dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Jenderal (Purn) Feisal Tanjung di Jakarta sebagai Bupati Kabupaten Tebo. Pelantikan tersebut

bersamaan dengan penandatanganan prasasti berdirinya Kabupaten Tebo. Bersamaan dengan itu disepakati bahwa lahirnya Kabupaten Tebo yaitu pada tanggal 12 Oktober 1999. Setelah terjadinya pemekaran, Kabupaten Tebo terbagi menjadi 6 Kecamatan yaitu : Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, KP Sumay dan KP VII Koto. Dengan memiliki luas wilayah 6461 Km². Penduduk Kabupaten Tebo setelah pemekaran terjadi, berjumlah 224.944 jiwa (Reza. : 7-8).

3. Hambatan yang terjadi dalam proses Pemekaran Kabupaten Tebo

Ada banyak pendapat dan ide yang terbesit didalam proses terjadinya pemekaran ini banyak tokoh masyarakat yang terlibat didalamnya, dan setiap tokoh memiliki pendapatnya masing-masing. Hambatan yang terjadi pada proses pemekaran ialah kondisi daerah belum siap untuk memiliki pemerintahan sendiri. Hambatan menjadi tidak berarti, karena dorongan yang kuat dari berbagai komponen masyarakat untuk menjadikan Tebo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi.

Alasan untuk meningkatkan perekonomian terhadap masyarakat adalah salah satu dorongan di lakukannya pemekaran Kabupaten Tebo, masyarakat serta tokoh masyarakat menyambut baik dengan kabarnya pemekaran ini dan berharap masyarakat Tebo memiliki perubahan yang lebih maju (Farida. : 221). Dengan adanya pemekaran tentunya memerlukan posisi jabatan dalam struktur Pemerintahan. Akhirnya dipilih beberapa pegawai dari Provinsi dan Kabupaten Bungo

yang sudah memiliki kualitas dan kemauan untuk memajukan menduduki jabatan baru di Kabupaten Tebo.

4. Faktor Pendukung dan penghambat Pemekaran

a. Faktor pendukung:

- 1) Kabupaten Tebo memiliki sumber daya alam yang potensial sehingga di anggap dapat membantu perekonomian dan memajukan wilayah nya sendiri.
- 2) Kabupaten Tebo memiliki sektor pertanian yang sangat subur dan ini juga alasan dimana di yakinkan Tebo bisa menjadi Kabupaten yang maju.
- 3) Kabupaten tebo memiliki dukungan dari luas wilayah yang di miliki mencapai 20% dari luas Provinsi Jambi sehingga itu di yakini bisa berkembang menjadi Kabupaten yang maju.
- 4) Daerah perkantoran awalnya cukup jauh dari pedesaan itu menjadikan alasannya untuk pemekaran sehingga dapat mempermudah jika jarak nya jauh lebih dekat.
- 5) Jumlah penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki pemerintahan sendiri

b. Faktor penghambat

- 1) Kabupaten Tebo awal nya di yakini belum siap untuk memiliki pemerintahan sendiri karna susunan bangunan kota belum layak untuk memiliki pemerintahan sendiri
- 2) Kantor- kantor kelembagaan belum terbentuk di wilayah Kabupaten Tebo pada saat itu

mereka masih menumpang di rumah-rumah warga.

- 3) Kondisi keuangan yang belum memadai untuk melakukan proses pengembangan Kabupaten, karna uang modal awal yang di serahkan oleh pusat yang tergolong rendah.
- 4) Pasokan listrik yang kurang memadai sehingga menghambat proses pemekaran

Ada beberapa dampak positif dan negatif tentang terjadinya pemekaran di Kabupaten Tebo menurut masyarakat :

a. Dampak Positif

- 1) pelayanan publik sudah lebih maju dengan 1 priode Bupati Tebo bisa membangun daerah perkantoran, dengan ini sangat di yakinkan dapat lebih membantu masyarakat.
 - 2) perkembangan ekonomi yang lebih maju dari sebelum pemekaran terjadi.
 - 3) luas daerah yang tidak lagi luas sehingga mempermudah pemerintah memperhatikan kekurangan daerahnya.
 - 4) lebih fokus mengembangkan sumber daya alam supaya bisa jauh lebih maju lagi.
 - 5) peningkatan infratuktur yang ada di kabupaten Tebo sehingga membuat Kabupaten itu sendiri jauh lebih maju dan dapat bersaing dengan Kabupaten lainnya.
 - 6) akses jalan dan jembatan lebih banyak sehingga mempermudah daerah yang dulunya tidak bisa dilewati menggunakan mobil atau motor
- ##### b. Dampak negatif

- 1) Kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk memajukan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Karena Pada awal pemekaran terlebih dahulu diprioritaskan pembangunan infrastuktur pemerintahan, namun diikuti oleh pembangunan lainnya dari tahun ketahun (Wawancara. Eko Nuryanto. 2022).
- 2) Dampak negatif di Kabupaten Tebo pasca pemekaran terbilang tidak ada karena besarnya dorongan dari masyarakat untuk memiliki pemerintahan sendiri dan keinginan masyarakat untuk memperbaiki perekonomian, meratakan pembangunan yang selama ini tertinggal. Faktor penghambat pada awal terjadinya pemekaran yakni Kabupaten Tebo belum memiliki kantor-kantor pemerintahan akan tetapi masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat atas bantuan pihak pemerintahan Kabupaten Bungo Tebo dan masyarakat sehingga tidak terjadi kendala dalam proses pemekaran Kabupaten Tebo tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan sistematis,maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Tebo menjadi daerah bagian Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha. Kabupaten Tebo juga pernah menjadi Daerah Pembantu Bupati Wilayah Timur saat masih bergabung dengan Kabupaten Bungo Tebo, dengan ini Kabupaten Tebo dianggap layak untuk memiliki Kabupaten sendiri. Dengan begitu

masyarakat memberikan aspirasi serta dukungan agar Tebo dapat dimekarkan menjadi Kabupaten. Masyarakat sangat berperan penting dalam proses pemekaran Kabupaten Tebo. Masing-masing perwakilan disetiap Kecamatan mengirim aspirasi agar Kabupaten Tebo segera dimekarkan. Hal ini pun didukung oleh Pemerintah Bungo Tebo dan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga proses pemekaran Kabupaten Tebo berjalan dengan lancar sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomr 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur. Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Tebo telah diresmikan yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan Pembantu, luas Kabupaten Tebo setelah pemekaran ialah 6.461 Km² dengan jumlah penduduk diawal pemekaran berjumlah 224.944 jiwa.

2. Perkembangan yang terjadi setelah pemekaran sangatlah pesat dari tahun ke tahun dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur bangunan maupun jalan, serta kondisi perkembangan sektor ekonomi terus meningkat yang dapat dibuktikan dengan penurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun di Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip. 2004. *Selayang Pandang Pembangunan Kabupaten Tebo*. Pemkot Tebo.

- Arsip. 2003. *Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tebo 2001-2005*. Pemkot Tebo,
- Aulia, Shuraya. "Perjuangan Rakyat Bungo Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi".
- Farida, Aulia dkk. Pertarungan gagasan dan kekuasaan dalam pemekaran wilayah. *Artikel* dalam Jurnal.
- PEMDA Bungo Tebo 1999, *pemantapan data rencana pemekaran kabupaten daerah tingkat II Bungo Tebo menjadi daerah tingkat II Bungo dan kabupaten daerah tingkat II Tebo*. Muaro tebo: Pemda Bungo Tebo.
- Reza, Kevin dkk, Sejarah Pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 1999-2015. *Artikel* dalam Jurnal.
- Susanto Zuhdi, *Sejarah Kabupaten Tebo*, hal 102
- Wawancara dengan pak Ridham Priskap selaku mantan SEKDA Kabupaten Tebo, tanggal 4 Februari 2022
- Wawancara dengan pak Eko Nuryanto selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, 10 Januari 2022 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Tebo